

Rekomendasi BPK Acuan Pemda

Harus Peroleh Predikat WTP

BOGOR—Wakil Presiden Boediono berharap para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjaga pengelolaan keuangan daerahnya dengan baik. Sebagai acuannya, Wapres meminta pemerintah daerah melaksanakan rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Pengelolaan keuangan di daerah mutlak harus benar-benar dijaga, buat setertib mungkin. Itu landasan apa pun, baik pelayanan publik dan lainnya," ujar Boediono di Balaikota Bogor kemarin. Dia berharap semua pemerintah daerah mampu memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk itu, Wapres mengimbau pemerintah daerah menerima asistensi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kement-

terian Keuangan memberikan insentif bagi daerah yang berprestasi. "Saya harap setiap tahun pemberian penghargaan tetap dilakukan dan ditingkatkan lagi," lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan 23 daerah yang memperoleh peringkat tertinggi atau berkinerja terbaik berdasar hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 2009. Daerah di Kalbar, tak ada satupun yang masuk.

Daerah-daerah tersebut terdiri dari tiga provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota. Tiga provinsi yang memperoleh peringkat terbaik sesuai hasil EKPPD 2009 adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Sementara 10 kabupaten yang memperoleh peringkat terbaik yakni Jombang, Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, Luwu Utara, Karanganyar, dan Kulonprogo. Selanjutnya, 10 kota yang memperoleh peringkat terbaik yakni Surakarta, Semarang, Banjar, Jogjakarta,

Cimahi, Sawah Lunto, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi, dan Bogor. Dalam kesempatan tersebut Wapres menyinggung tentang reformasi yang terjadi di Indonesia. Menurut Wapres, ada beberapa kunci dalam reformasi ini yakni demokratisasi serta desentralisasi atau otonomi daerah.

Menurut dia, pemerintah pusat maupun daerah harus turut menjaga hal itu. "Demokratisasi serta desentralisasi dan otonomi daerah ini harus terus dikawal, agar sukses, dan tidak melenceng dari tujuan sebenarnya," kata dia.

Boediono menilai, kemajuan sejumlah daerah sangat luar biasa sejak desentralisasi berlaku tahun 1999. Dia berharap, pemerintah daerah tetap memperhatikan masalah korupsi, kesempatan kerja, kemampuan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.

"Apapun penilaian masyarakat yang terpenting bagaimana mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus di jaga, serta tertib," jelasnya. (*wir/fat*)